

Peran Publik Relation KPID Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Literasi Media Masyarakat: Studi Fenomenologi

Kabillah Hasyim¹, Sepriadi Saputra²

^{1,2} Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
Email Corespondensi: kabillahhasyim_23051410171@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of information technology allows the public to easily access information through broadcasting and digital media platforms. However, the ability of society to comprehend and critically evaluate media content remains uneven, which contributes to the spread of misinformation and hoaxes. This study aims to explore the role of Public Relations at the Regional Indonesian Broadcasting Commission of South Sumatra (KPID South Sumatra) in enhancing media literacy among the community, as well as to identify the main challenges encountered in the implementation of media literacy programs. This research employs a qualitative method with a phenomenological approach, applying in-depth interviews, online observation, and public content analysis from internet-based sources. The findings indicate that KPID's Public Relations performs an educational role through digital information dissemination, healthy broadcasting campaigns, and interactive communication services with the public. Nonetheless, limited human resources and the lack of community participation remain significant obstacles. The study highlights the need for stronger collaborative efforts across institutions to improve media literacy development evenly throughout South Sumatra.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dari media penyiaran dan media digital. Namun, kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengevaluasi informasi masih belum merata sehingga berpotensi memunculkan penyalahgunaan informasi dan penyebaran hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Public Relations Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan dalam meningkatkan literasi media masyarakat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program literasi media. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui teknik wawancara mendalam, observasi daring, dan analisis konten publik yang diakses melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas KPID menjalankan fungsi edukasi publik melalui penyebaran konten informasi digital, sosialisasi penyiaran sehat, serta pelayanan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya dan minimnya partisipasi publik masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program literasi media. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas pihak untuk mewujudkan literasi media yang lebih merata di Sumatera Selatan.

KEYWORDS:

Media Literacy, Public Relations, KPID South Sumatra, Broadcasting Communication, Phenomenology.

KATA KUNCI:

Literasi Media, Humas Pemerintah, KPID Sumatera Selatan, Komunikasi Penyiaran, Fenomenologi.

How to Cite:

“Hasyim, K., & Saputra , S. (2025). Peran Publik Relation KPID Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Literasi Media Masyarakat: Studi Fenomenologi. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(6), 1059–1064.”

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat secara signifikan. Informasi dengan mudah tersebar melalui media digital dan media penyiaran, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai konten dalam waktu singkat Namun, derasnya arus informasi juga menimbulkan persoalan baru, terutama karena masih banyak informasi yang tidak melalui proses verifikasi sehingga dapat menimbulkan disinformasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat luas (Nababan et al., 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Berdasarkan survei APJII tahun 2018, jumlah pengguna internet mencapai 171,17 juta jiwa atau 64,8% dari populasi nasional. Angka tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 10,12% atau 27,9 juta pengguna baru dalam satu tahun (S & Hardiansyah, 2016). Peningkatan ini menunjukkan potensi digital yang besar, namun juga menjadi tantangan karena semakin banyak peluang tersebarnya hoaks yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan hubungan antar-lapisan masyarakat.

Dalam situasi ini, Pemerintah memiliki peran penting menghadirkan edukasi literasi media melalui lembaga-lembaga resmi agar masyarakat memiliki kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara bertanggung jawab (Hidayat, 2022). Salah satu lembaga yang berperan sentral dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), yang dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 untuk mengawasi penyelenggaraan penyiaran di daerah (Maulida Nuzula Firdaus, 2023). Dengan mandat tersebut, KPID bertugas menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi yang layak, benar, dan bermutu (S & Hardiansyah, 2016).

KPID Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab luas dalam menjaga kualitas siaran dan memastikan pelaksanaan pengawasan isi serta pengaduan publik berjalan efektif . Selain fungsi pengawasan, KPID juga menyediakan layanan komunikasi publik melalui website, media sosial, dan fasilitas interaksi masyarakat untuk menyampaikan masukan mengenai siaran yang beredar di masyarakat (S & Hardiansyah, 2016). Kehadiran saluran komunikasi ini menjadi wadah penting bagi masyarakat dalam terlibat aktif mengawasi isi penyiaran.

Namun, penelitian tentang KPID Sumatera Selatan yang telah dilakukan sebelumnya masih berfokus pada pengaturan dan tindakan pengawasan dalam konten penyiaran, seperti kasus program siaran kesehatan di PALTV, yang hanya membahas aspek pengaturan penyiaran dan tidak meninjau kegiatan literasi medianya (S & Hardiansyah, 2016). Di sisi lain, studi literasi media pemerintah pada konteks nasional lebih menyoroti peningkatan kompetensi humas pemerintah dalam penggunaan media sosial, bukan pada penguatan literasi media publik di level daerah (Intanny & Putra, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa kajian akademik mengenai peran PR KPID dalam edukasi literasi media masyarakat Sumatera Selatan masih belum banyak dikembangkan, sehingga menjadi research gap yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Di tengah meningkatnya ancaman hoaks dan rendahnya literasi media, humas KPID berfungsi sebagai fasilitator komunikasi antara lembaga penyiaran dan masyarakat untuk menciptakan komunikasi dua arah yang saling membangun. Humas pemerintah dituntut menyentuh semua lapisan publik sebagai upaya menciptakan informasi yang sehat, kondusif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas penyiaran daerah (Nababan et al., 2020). Dengan demikian, strategi komunikasi yang diterapkan humas KPID menjadi aspek kunci dalam mendorong peningkatan literasi media publik.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana peran Public Relations (Humas) KPID Sumatera Selatan dalam mengedukasi masyarakat terkait literasi media, (2) kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program literasi media. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi humas KPID dalam meningkatkan literasi media, serta mengungkap hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan edukasi literasi media di masyarakat.

Keunikan dan kontribusi (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang belum banyak diteliti, yaitu peran kehumasan KPID Sumatera Selatan dalam edukasi publik terkait literasi media secara konkret melalui pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam bidang kajian komunikasi penyiaran, serta manfaat praktis bagi KPID dalam memperkuat program literasi media guna mewujudkan masyarakat yang lebih kritis, cerdas, dan selektif terhadap informasi yang dikonsumsi (Nugroho, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara langsung pengalaman, pandangan, dan makna yang dialami oleh Public Relations KPID Sumatera Selatan dalam menjalankan perannya mengedukasi masyarakat terkait literasi media. Fenomenologi memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali realitas sosial yang dialami subjek secara mendalam melalui perspektif mereka sendiri sebagai pelaku komunikasi.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai lembaga penyiaran di tingkat daerah yang berperan langsung dalam pengawasan dan edukasi media. Subjek penelitian adalah pihak internal KPID yang menangani fungsi kehumasan serta program literasi media.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga tahap akhir penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi aktivitas KPID secara daring, serta studi pustaka dianalisis dengan terlebih dahulu melakukan reduksi data untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai peran humas dalam literasi media. Seluruh data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik sehingga peneliti dapat melihat pola dan hubungan antar temuan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi secara mendalam untuk menarik kesimpulan mengenai makna pengalaman yang disampaikan oleh informan dan fenomena yang diamati, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fakta empiris tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam terkait strategi dan kendala yang dihadapi Public Relations KPID Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan literasi media masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dan observasi daring menunjukkan bahwa Humas KPID Sumatera Selatan menjalankan peran edukatif dalam literasi media melalui beberapa jalur komunikasi publik. Pertama, Humas aktif mempublikasikan infografis dan panduan singkat tentang bagaimana mengenali konten negatif atau hoaks di media sosial, melalui kanal resmi mereka. Panduan ini kerap mendapat tanggapan dari masyarakat muda yang menyatakan bahwa konten tersebut membantu mereka menjadi lebih kritis terhadap informasi (Saepudin,E,komariah, N & damayani, N, 2023). Hal ini menggambarkan bahwa peran KPID tidak semata sebagai regulator siaran, melainkan juga sebagai agen literasi yang berusaha membentuk kesadaran kritis warga terhadap media.

Dalam banyak unggahan edukatif, respons publik bervariasi: sebagian menunjukkan dukungan tinggi dan apresiasi, sementara sebagian lain mempertanyakan sejauh mana panduan daring dapat mengantikan pemahaman mendalam terhadap konten siaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya edukasi dijalankan, literasi media di masyarakat belum merata yaitu terdapat perbedaan dalam kemampuan menilai dan menyaring informasi. Situasi tersebut selaras dengan temuan sebelumnya bahwa literasi media di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konsistensi pemahaman dan akses informasi (lihat penelitian tentang literasi media masyarakat).

Lebih lanjut, data dari wawancara mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi Humas KPID dalam pelaksanaan edukasi literasi media. Para informan menyebut bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran membatasi frekuensi dan jangkauan program edukasi, terutama di wilayah pedesaan atau kawasan terpencil. Selain itu, kecepatan arus informasi dan maraknya konten negatif atau hoaks membuat upaya edukasi terasa seperti berjalan “di belakang” arus media ketika satu

panduan diterbitkan, informasi baru sudah menyebar. Hal ini menunjukkan bahwa usaha literasi media perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dinamis agar dapat efektif (Sari,y & prasetya, 2022).

Dari analisis fenomenologis, tampak bahwa bagi tim Humas KPID, tujuan utama edukasi literasi media bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memilah konten media. Mereka memahami bahwa literasi media adalah upaya jangka panjang dan membutuhkan keterlibatan aktif publik. Sikap ini penting karena literasi media efektif hanya ketika masyarakat dilibatkan sebagai penerima sekaligus penilai konten.

Namun, efektivitas upaya tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat pendidikan, akses internet, serta budaya literasi di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Humas telah berupaya semaksimal mungkin, hasil edukasi tidak selalu seragam sebagian kelompok lebih tanggap, sebagian lain masih apatis atau tidak peduli terhadap isu literasi media. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi media bukan hanya persoalan penyediaan informasi, tetapi juga soal konteks sosial dan struktural masyarakat.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Humas KPID Sumatera Selatan dalam literasi media memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya konten negatif dan hoaks. Namun agar keberhasilan lebih maksimal, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif, penggunaan metode edukasi yang beragam (tidak hanya daring) (Hidayat, 2022), serta kolaborasi dengan pihak lain seperti institusi pendidikan dan komunitas lokal agar literasi media menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Public Relations KPID Sumatera Selatan dalam meningkatkan literasi media masyarakat, dapat disimpulkan bahwa humas memiliki kontribusi strategis dalam upaya pembentukan pemahaman kritis publik terhadap isi siaran dan informasi yang beredar di media. Humas KPID menjalankan fungsi edukatif melalui penyebaran konten informasi berbasis digital, pelaksanaan sosialisasi penyiaran sehat, dan penyediaan sarana layanan publik untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait siaran yang dinilai melanggar aturan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mengarahkan masyarakat agar tidak hanya menjadi konsumen media, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menilai dan menyaring informasi secara bertanggung jawab.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan edukasi literasi media, Humas KPID menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan audiens yang tidak merata, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap isu literasi media. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa program literasi media membutuhkan strategi yang lebih

kolaboratif dan berkelanjutan agar mampu menjangkau semua lapisan masyarakat di Sumatera Selatan. Dengan demikian, peran humas tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga menciptakan ruang interaktif yang mendukung terciptanya masyarakat yang sadar, kritis, dan selektif terhadap pesan media.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada KPID Sumatera Selatan untuk memperluas jangkauan edukasi literasi media melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media lokal agar pesan literasi dapat tersampaikan secara lebih efektif dan merata. Pemanfaatan teknologi komunikasi juga perlu ditingkatkan, tidak hanya sebagai kanal penyampaian informasi, tetapi sebagai media pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan mudah diakses masyarakat umum.

Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas internal humas KPID dalam aspek perencanaan komunikasi strategis agar program literasi media yang dijalankan dapat berkesinambungan dan memiliki dampak yang terukur. KPID juga diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan literasi, sehingga dapat ditemukan formula terbaik dalam penyampaian pesan edukatif. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengumpulan data yang lebih luas, baik melalui komunitas maupun kelompok audiens tertentu, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas edukasi literasi media yang dilakukan oleh lembaga penyiaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chandra, a & R. (2021). Riset kipd sumsel. Komunikasi Nusantara.
- [2] Hidayat, D. (2022). Riset digital humas pemerintah. Observasi Komunikasi.
- [3] Intanny, V. A., & Putra, N. A. (2019). Studi Eksperimen Peningkatan Literasi Media Sosial Humas Pemerintah Daerah. IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 21(2), 109-122.
- [4] Maulida Nuzula Firdaus. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. 2(4), 31-41.
- [5] Nababan, S., Tinggi, S., Media, M., Mmtc, ", & Yogyakarta, ". (2020). Model Komunikasi Humas dalam Literasi Media Sosial (Studi Kasus Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika) Public Relations Communication Model in Social Media Literacy (Case Study of the Directorate General. Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi, 4(10), 2-3.
- [6] Nugroho, A. (2020). Riset literasi media tetapi lingkup nasional, buku daerah. Komunikasi.
- [7] S, R. R., & Hardiansyah. (2016). Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Pada Program Siaran Kesehatan Di Televisi Paltv. Jurnal Inovasi, 10(2), 73-82.
<https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/665>
- [8] Saepudin,E,komariah, N & damayani, N, A. (2023). Literasi media sebagai sarana pembelajaran anak usia dini. Aplikasi IPTEKS UNTUK MASYARAKAT.
- [9] Sari,y & prasetya, h. (2022). Literasi Media pada mahasiswa ilmu komunikasi universitas mmulawarman. Dinamika Ilmu Komunikasi